

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Edisi 1, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 1982, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum Dan Kebijakan Publik: Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*, Cet. II, Setara Press, Malang.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ni,matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. I, Nusa Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Rudito, dkk, 2016, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta.

Sarwoto, 1981, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujanto, 1986, *Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cet. II Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 569.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6.

C. Jurnal-Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945 (Division Of The Central Government And The Regional Government

Authority In The Autonomy Based On The Constitution 1945)", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 4, Oktober-Desember.

Ade Risha Riswanti, 2013, "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia", Makalah.

Bambang Sutrisno, 2013, "Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 17, Pebruari.

Ester Sarina Purba dan Sri Yunita, 2017, "Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 Nomor 1.

Galuh Wahyu Kumalasari, 2016, "Konsep Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata", Prosiding Seminar Nasional.

Iswanto, dkk, 2016, "Timbulan Sampah B3 Rumahtangga Dan Potensi Dampak Kesehatan Lingkungan Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Generation Of Household Hazardous Solid Waste And Potential Impacts On Environmental Health In Sleman Regency, Yogyakarta)" *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Volume 23 Nomor 2, Juli.

Mifta Farid, dkk, 2017, "Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah", *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4 Nomor 2.

R. Agus Abikusna, 2019, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01, Januari-Juni.

Riadhi Alhayyan dan Jelly Leviza, 2020, "Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Terkait Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember.

Sandy Gustiawan Ruhiyat, Dkk, 2022, Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Regional Authority In Protection And Management Of The Environment Post-Application Of The Copyright Law) *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 7, Nomor 1, Oktober.

Sapto Wahyono, 2018, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014" *Jurnal Yustitia*, Volume 19 Nomor 1, Mei.

Setiyono, 2001, “Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Januari.

Sodikin, 2016, “Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pada Masyarakat Sidoarjo”, Prosiding Seminar Nasional.

Sulistiyani Eka Lestari Dan Hardianto Djanggih, 2019, “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 Nomor 2, April.

Terry Irawansyah Putra, dkk, 2019, “Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga: Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma”, *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Volume 8 Nomor 2, Oktober.

D. Internet/Sumber Lainnya

<https://environment-indonesia.com/articles/cara-mengolah-dan-menangani-limbah-b3-dengan-benar/> diakses pada tanggal 01 Desember 2021

<https://kominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-153-izin-pembuangan-limbah-b3-akan-dibagi-ke-daerah.html> diakses pada tanggal 03 Desember 2021

<https://mutuinstitute.com/post/pengolahan-limbah-b3/> diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

<https://formasibisnis.com/artikel/pengolahan-limbah-b3-sebagai-salah-satu-cara-penanganan> diakses pada tanggal 05 Desember 2021

<https://www.merdeka.com/jateng/tujuan-otonomi-daerah-kewenangan-dan-hak-penyelenggaraan-perlu-diketahui-kln.html> diakses pada tanggal 06 Desember 2021.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=744:perusakan-lingkungan-dan-pencegahan-kejahatan&catid=120&Itemid=190&lang=en diakses pada tanggal 23 Juni 2023